BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Standar Operasional Prosedur

1. Pengertian

Bagi dunia kerja, SOP merupakan salah satu acuan karyawan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar efektif dan efisien. Pada dasarnya SOP (*Standard Operating Procedure*) merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur Suatu tahapan proses kerja atau suatu prosedur.¹¹ Menurut Hartatik SOP adalah sebuah acuan kerja yang baik, baku dan dapat mempermudah mengontrol dan mengendalikan kegiatan operasional dalam suatu perusahaan.¹²

Menurut Rudi M. Tambunan dalam bukunya, SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten. SOP mencakup langkah-langkah yang terperinci dan jelas mengenai prosedur yang harus diikuti oleh karyawan dalam melaksanakan tugas tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas hasil kerja.¹³

SOP (*Standard Operating Procedures*) yaitu suatu sistem yang berguna atau digunakan untuk mengendalikan pekerjaan. Sedangkan

¹¹ Supriyanto, S., & Hendriyati, L, “Analisa Pengaruh Sop (Standard Operating Procedure) Terhadap Kinerja Waiter Dan Waitress Di in Bloom Restoran Hotel Ayaartta Malioboro Yogyakarta, Indonesia”. *Journal of Tourism and Economic*, Vol 4 No. 1, (2021): 73-74.

¹² Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H, *Prosedur Dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal. Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 4 No. 2, (2020): 12.

¹³ Rudi M. Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procrdures (SOP)* (Jakarta : Maiestas, 2013).

Santosa menjelaskan mengenai suatu langkah-langkah khusus yang spesifik yang digunakan untuk menjelaskan dari suatu aktifitas secara terperinci untuk menyempurnakan suatu Pekerjaan sesuai dengan regulasi, perusahaan, kesehatan, pendidikan, penerbangan, perindustrian bahkan menjalankan usaha kecil.¹⁴

Dalam hukum pidana Islam, Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dikenal dengan istilah tertentu seperti "adab" atau "etika". SOP dalam konteks ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan dalam penerapan hukum pidana.

Secara luas, SOP merupakan dokumen yang menjelaskan aktivitas operasional yang dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari, dengan tujuan agar tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten. Suatu perusahaan pasti memerlukan suatu prosedur kerja untuk dijadikan sebagai pedoman kerja. Tata kerja, penting artinya sebagai pola kerja yang tak lain.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur serangkaian instruksi tertulis yang menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan dan tugas operasional. Prosedur yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk mengatur dan memandu pelaksanaan kegiatan. Membantu mencapai konsistensi, efisiensi, dan kualitas kerja serta memungkinkan pengukuran kinerja dan mengidentifikasi area perbaikan. Dengan mengikuti standar operasional yang jelas, maka organisasi dapat mengelola kinerja dengan baik.

¹⁴ Pristiana, U., & Susanti, N., Penyusunan Sop Kawasan Wisata Dusun Segunung, Desa Carang Wulung Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, Vol 1 No. 3, (2021): 351-352.

2. Dasar Hukum

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki dasar hukum yang mengatur pembuatannya di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang sering digunakan dalam pembuatan dan penerapan SOP di berbagai instansi pemerintah dan swasta antara lain:¹⁵

- a. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - 1) Pasal 15 ayat (1) mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
 - 2) Pasal 20 mengatur bahwa standar pelayanan tersebut harus dituangkan dalam SOP.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur secara rinci tentang penyusunan standar pelayanan publik yang harus mencakup SOP.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN RB) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang didalamnya menjelaskan, Permen PAN RB ini memberikan pedoman tentang bagaimana menyusun SOP di lingkungan pemerintahan.
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Standar di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana Keputusan ini memberikan panduan teknis tentang penyusunan SOP di lingkungan instansi pemerintah.

¹⁵ Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M., "Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis". Jurnal interpretasi hukum, Vol 1, No. 1, (2020), 7-9.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4, bahwa setiap pegawai negeri sipil harus mematuhi SOP yang berlaku di instansi masing-masing.

Sedangkan Dasar Hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut Hukum Pidana Umum Indonesia ialah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur berbagai aspek pidana, termasuk tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks SOP, pelanggaran terhadap SOP yang mengakibatkan tindak pidana dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP.
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur tugas dan wewenang Polri, termasuk penggunaan kekuatan dan senjata api. SOP yang disusun berdasarkan undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tindakan Polri sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶
- 3) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian: Mengatur secara rinci penggunaan kekuatan oleh anggota Polri, termasuk senjata api.¹⁷
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api: Spesifik mengatur standar operasional penggunaan senjata api oleh anggota Polri, termasuk prinsip-prinsip penggunaan, kondisi yang membenarkan penggunaan, dan prosedur penggunaan senjata api.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷ Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

¹⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api.

Dasar Hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut Hukum Pidana Islam ialah :

- a. Al-Qur'an: Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Qur'an memberikan pedoman moral dan etika yang mendasari semua tindakan, termasuk penggunaan kekuatan.
- b. Hadits: Kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Hadis memberikan contoh praktis penerapan prinsip-prinsip syariah.
- c. Ijtihad: Proses penafsiran dan penerapan hukum Islam oleh para ulama untuk konteks-konteks yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad mencakup qiyas (analogi), istihsan (diskresi), dan maslahah (kepentingan umum).

3. Jenis

Dilihat dari jenis kegiatan yang akan dilakukan, SOP terbagi menjadi 2 yakni SOP spesifik dan generik.

- a. SOP berdasarkan jenis kegiatan

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP Generik)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Generik adalah panduan atau instruksi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional dilakukan dengan cara yang konsisten dan efisien. SOP Generik biasanya mencakup langkah-langkah umum yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi atau jenis pekerjaan, tanpa spesifikasi detail yang hanya berlaku untuk kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari SOP Generik:¹⁹

- a) Dokumentasi Proses: SOP Generik mendokumentasikan langkah-langkah standar yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas atau proses tertentu.
- b) Konsistensi: Dengan adanya SOP Generik, semua anggota

¹⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

tim atau organisasi dapat mengikuti prosedur yang sama, yang mengurangi variasi dalam cara kerja.

- c) Efisiensi: Prosedur yang sudah teruji dan disederhanakan membantu dalam mencapai efisiensi operasional.
- d) Kepatuhan: SOP Generik memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
- e) Pelatihan: SOP dapat digunakan sebagai alat pelatihan bagi karyawan baru untuk memastikan mereka memahami prosedur standar.
- f) Pengurangan Kesalahan: Dengan mengikuti SOP, potensi kesalahan dapat diminimalkan karena langkah-langkah yang sudah ditetapkan harus diikuti.

b. SOP Berdasarkan Sifat Kegiatan

1) Standar Operasional Prosedur (SOP Administratif)

SOP administratif adalah dokumen yang berisi aturan pelaksanaan aksi tanpa mencantumkan prosedur yang terperinci. SOP jenis ini memang dibuat lebih umum dan hanya memuat gambaran pelaksanaan tugas yang sifatnya makro.

2) SOP Teknis

SOP teknis adalah petunjuk yang memuat cara pelaksanaan aksi secara urut, lengkap dan detail. Dokumen ini tidak hanya menampilkan tugas secara umum, melainkan juga rincian pelaksanaan dari awal sampai akhir.

c. SOP Berdasarkan Skala Kegiatan

1) Standar Operasional Prosedur (SOP Mikro)

SOP mikro merupakan salah satu dari macam-macam Standar Operasional Prosedur yang dilihat dari skala kegiatannya. Disebut sebagai SOP mikro karena dokumen tersebut disusun sebagai petunjuk pelaksanaan dari aksi yang skalanya kecil.

2) Standar Operasional Prosedur (SOP Makro)

SOP makro adalah aturan pelaksanaan kegiatan yang skalanya

lebih besar. Penyusunan SOP makro dilakukan dengan cermat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Bisa dikatakan juga bahwa standar operasional yang bersifat makro adalah kumpulan dari beberapa petunjuk pelaksanaan mikro. Tujuannya untuk melancarkan suatu aksi atau pekerjaan sehingga menghasilkan output yang optimal.

4. Unsur - Unsur

Unsur-unsur dalam Standar Operasional Prosedur sangat menentukan efektivitas penyusunan dan penerapan SOP itu sendiri. Unsur-unsur SOP tidak hanya bermanfaat untuk menjadi rujukan penyusunan, akan tetapi juga berguna sebagai senjata kontrol pelaksanaan penyusunan SOP, yaitu untuk melihat apakah SOP yang disusun telah lengkap atau tidak. Adapun unsur-unsur SOP yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan SOP menurut Rudi M. Tambunan dalam buku *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)* antara lain adalah sebagai berikut:²⁰

a. Tujuan

Tujuan penyusunan SOP merupakan landasan setiap prosedur dan langkah-langkah kegiatan di dalam SOP.

b. Kebijakan

Pernyataan kebijakan bertujuan mendukung pelaksanaan prosedur secara efektif, efisien dan bersifat spesifik untuk masing-masing prosedur.

c. Petunjuk operasional

Petunjuk operasional sangat penting untuk mengarahkan pengguna bagaimana membaca dan memahami prosedur dokumen SOP. Petunjuk operasional disajikan di halaman awal

²⁰ Rudi M. Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)* (Jakarta : Maiestas, 2013).

pedoman. Petunjuk ini harus dinyatakan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

d. Pihak yang terlibat

Sebagai pihak penyusun, sebaiknya SOP disusun oleh satu tim. Hal ini bertujuan supaya perihal dalam perubahan SOP mudah dikomunikasikan.

e. Formulir

Formulir di sini adalah bentuk standard dan dokumen-dokumen kosong yang sering juga disebut blanko atau dokumen. Di dalam SOP, blanko atau dokumen merupakan media validasi dan control prosedur. Jadi, formulir ini berfungsi sebagai kontrol SOP serta pelaksanaan audit. Oleh karena itu, didalam pedoman SOP harus juga dijelaskan dengan tepat bagaimana cara pengisian setiap formulir dalam prosedur yang bersangkutan.

f. Masukan

Kemudian media masukan disiapkan, sehingga kegiatan di dalam sistem dapat dilakukan, dengan asumsi bahwa kualitas sudah memenuhi persyaratan sesuai yang dinyatakan dalam kebijakan atau pun syarat prosedur.

g. Proses

Tujuan proses di sini adalah mengubah masukan menjadi keluaran. Proses dapat terdiri dari satu atau lebih subproses. Data dan informasi di dalam masukan diubah menjadi informasi dan knowledge yang dibutuhkan oleh organisasi atau instansi untuk pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

h. Laporan

Laporan yang dimaksud dalam SOP harus dibedakan dengan formulir, blanko, atau dokumen. Laporan dalam suatu prosedur, biasanya sangat spesifik dan tidak akan sama dengan laporan yang diproduksi di dalam prosedur lain.

i. Validasi

Bagian yang penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi. Tujuan melakukan validasi untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dan kegiatan yang dilakukan telah sah (valid).

j. Kontrol

Kontrol bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menurut spesifikasinya, prosedurnya, kepatuhannya, dan sebagainya. Untuk dapat menerapkan SOP dan prosedur-prosedur, maka kontrol yang diterapkan harus mencakup semua bentuk kontrol tersebut.

5. Standar Operasional Prosedur Senjata Api di Indonesia

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut: “bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”.²¹

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawiraman. Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing: Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD dan anggota DPR/MPR.⁴² Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta.²²

²² Suwanda, I. W., & Suda, I. W. J., "Peraturan Dan Prosedur Serta Mekanise Perijinan Senjata Api". *Ganec Swara*, Vol 15 No. 2, (2021): 1188-1190.

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/2004 tanggal 16 februari 2004. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/Polri, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliberr 12 GA dan KA secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.82/II.2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organiik TNI/Polri. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri.

Prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dahulu dilihat dari sisi urgensinya. Selain itu mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

- a. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti Direktur Utama, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara, dan Dokter.
- b. Calon pemilik senjata api, minimal selama 3 (tiga) tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan.
- c. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.
- d. Jika semuanya sudah tepenuhi maka pemakaian senjata api hanya untuk membela diri saja. Senjata api yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.

Berikut prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian:²³

- 1) Pemohon harus memenuhi syarat medis
Jika ingin memiliki senjata api legal, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.
- 2) Pemohon harus lolos seleksi psikotes
Orang yang cepat gugup dan panik dalam menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak bisa memiliki izin kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah.
- 3) Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana
Pemohon harus berkelakuan baik sebelum mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Tidak pernah terlibat kasus pidana yang bisa dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari Kepolisian.
- 4) Usia pemohon harus terpenuhi
Batas usia yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
- 5) Pemohon harus memenuhi syarat administratif
Syarat administratif yang harus dipenuhi berupa:
 - a) Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar;
 - b) Fotocopy KK sebanyak 5 lembar;
 - c) Fotocopy SKCK, rekomendasi Kapolda setempat;
 - d) Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar;
 - e) Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar;
 - f) Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar;

²³ <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata> ,

- g) Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri.
- 6) Jenis senjata api yang boleh dimiliki
 - a) Senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22
 - b) Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm
 - c) Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22

B. Senjata Api

1. Pengertian

Senjata api menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan sebagainya. Senjata api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil.²⁴

Didalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bahwa senjata api adalah suatu alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru atau proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari ledakan amunisi.²⁵

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan

²⁴ M. Reza Pratama, *Faktor Penyebab Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan Di Masyarakat*, (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023), 2.

²⁵ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri* (Yogyakarta : Deepublish, 2021), 3.

kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, senjata api merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana.

Dalam hukum pidana umum, senjata api didefinisikan sebagai alat yang menembakkan peluru atau proyektil lain melalui ledakan bahan peledak. Definisi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022, serta konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang Senjata Ringan dan Kecil.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pengertian senjata api tidak dirumuskan secara spesifik dalam teks-teks klasik, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip umum penggunaan kekuatan untuk pertahanan diri dan perlindungan orang lain. Penggunaan senjata api dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, proporsionalitas, niat yang benar, dan etika. Para ulama menggunakan ijtihad dan fatwa untuk memberikan panduan yang relevan dengan konteks modern, memastikan bahwa penggunaan senjata api dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang. Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara text book yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya.

Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis

senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan, Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2. Dasar Hukum

Pengguna senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan undang-undang tersebut. Dimana Polri memperbolehkan masyarakat sipil menguasai senjata api. Berikut dasar hukum penggunaan senjata api di Indonesia :

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948

Undang-undang ini mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin penggunaan senjata api. Senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil harus didaftarkan di Kepolisian daerah, tempat orang tersebut berdomisili. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa yang bukan anggota TNI atau POLRI yang memiliki senjata api harus mempunyai surat izin dari kepolisian. Hal yang demikian telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 yang berbunyi : “setiap orang yang bukan anggota tentara atau Polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kapolri”. Sedangkan surat izin yang dimaksud merupakan kewenangan dari Kapolri sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 yang berbunyi : “yang berhak memberikan surat

izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian karesidenan atau orang yang ditunjuknya”.²⁶

- b. Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
Ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada dasarnya mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara. Melalui peraturan ini pula ditetapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan ini berbunyi : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Peraturan ini bisanya digunakan untuk kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, maupun kasus penyelundupan senjata api ke Indonesia. Sebab Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951 ini merupakan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum dicabut, di dalamnya juga mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api.²⁷

- c. Surat keputusan Kapolri : Skep/82/II/2004

Surat keputusan ini ialah tentang petunjuk pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI dimana dalam buku petunjuk ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

²⁷ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.

yang dimiliki oleh instansi pemerintah, badan usaha swasta, ataupun perorangan, baik untuk kepentingan olahraga, bela diri, maupun untuk kepentingan kelengkapan tugas bagi anggota Satpam/Polsus. Kewenangan untuk membuat surat keputusan Kapolri di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960. Peraturan perundangan ini memberikan wewenang kepada Kapolri sebagai pihak yang dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan izin senjata api. Surat keputusan Kapolri berperan dalam mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai senjata api meskipun sudah diatur secara konkret dalam Undang-Undang perlu adanya pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Selanjutnya dibuat surat keputusan Kapolri : Skep 82/II/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, yang di dalamnya mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemilikan senjata api.

d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Kapolri ini ialah tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dimana dalam peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimiliki oleh pengguna senjata api olahraga khusus hanya untuk tujuan olahraga.²⁸

Peraturan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api olahraga untuk memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaannya, peraturan Kapolri ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api olahraga.

Sedangkan dalam hukum pidana islam Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan senjata api karena teknologi ini

²⁸ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Olahraga.

belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan alat untuk pertahanan diri dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Berikut adalah dasar-dasar penggunaan senjata api dalam hukum pidana Islam:

1. Al-Qur'an

a) Al-Qur'an Surah Al-Hajj (22:39)

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ²⁹

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka.”²⁹

b) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:190)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”³⁰

2. Hadits tentang Pembelaan Diri

الحديث:

مَنْ قُتِلَ « قَالَ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ

دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Barang siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela darahnya (jiwanya) maka dia syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela agamanya maka dia syahid.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i).³¹

Hadits ini menunjukkan bahwa membela diri, harta, dan agama adalah tindakan yang dibenarkan dan bahkan dihargai. Dalam konteks modern, ini bisa mencakup penggunaan senjata api untuk pertahanan diri.

²⁹ Qur'an Kementerian Agama dan Terjemahannya, Q.S Al-Hajj/22:39.

³⁰ Qur'an Kementerian Agama dan Terjemahannya, Q.S Al-Baqarah/2:190.

³¹ HR. Abu Daud No. 4772 ,dan An Nasa'i No. 4099. Al Hafizh Abu Thohir.

3. Ijtihad dan Fatwa Ulama

a. Ijtihad

Ijtihad adalah proses penafsiran dan penerapan hukum Islam oleh para ulama untuk situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal senjata api, ulama menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan panduan mengenai penggunaannya.

b. Fatwa

Fatwa adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau dewan fatwa. Fatwa mengenai penggunaan senjata api biasanya menekankan pentingnya niat yang benar, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

3. Hak dan Kewajiban

Penggunaan senjata api diatur secara ketat oleh hukum di banyak negara, termasuk Di Indonesia, peraturan mengenai senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan bahan peledak. Pengguna senjata api memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan penggunaan yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban pengguna senjata api:³²

Hak Pengguna Senjata Api

1. Memiliki Senjata Api: Pengguna yang telah mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang memiliki hak untuk memiliki senjata api.
2. Membela Diri: Dalam situasi tertentu, pengguna senjata api memiliki hak untuk menggunakan senjata tersebut untuk membela diri, keluarga, atau orang lain dari ancaman yang mengancam jiwa.

³² Manuhutu, P., Alfons, S. S., & Latumaerissa, D, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api". SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol 3 No. 1, (2023): 1-3.

3. Berburu dan Olahraga: Pengguna dengan izin khusus dapat menggunakan senjata api untuk kegiatan berburu atau olahraga menembak.

Kewajiban Pengguna Senjata Api

1. Mematuhi Hukum dan Peraturan: Pengguna wajib mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan senjata api.
2. Mengikuti Pelatihan: Pengguna diwajibkan untuk mengikuti pelatihan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan senjata api dengan aman dan benar.
3. Penyimpanan yang Aman: Pengguna harus menyimpan senjata api di tempat yang aman dan terkunci untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang.
4. Melaporkan Kehilangan atau Pencurian: Jika senjata api hilang atau dicuri, pengguna wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
5. Tidak Menyalahgunakan Senjata Api: Pengguna tidak boleh menggunakan senjata api untuk tujuan yang melanggar hukum atau yang dapat membahayakan orang lain.

4. Fungsi

Senjata api memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:³³

- a. Pertahanan dan Keamanan: Senjata api digunakan oleh militer, polisi, dan petugas keamanan untuk melindungi negara, menjaga ketertiban umum, dan melindungi individu dari ancaman.
- b. Berburu: Di beberapa negara, senjata api digunakan untuk berburu

³³ Hidayat, A., Nawi, S., & Arsyad, N, “Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian”. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 3 No. 2, (2022): 85-88.

hewan sebagai bagian dari tradisi, hobi, atau pengendalian populasi hewan.

- c. Olahraga Menembak: Ada banyak disiplin olahraga yang melibatkan senjata api, seperti menembak sasaran, menembak trap, dan skeet shooting. Kompetisi ini diatur secara ketat dan memerlukan keterampilan tinggi.
- d. Pengumpulan dan Koleksi: Beberapa orang mengumpulkan senjata api sebagai hobi, baik karena nilai sejarah, estetika, atau mekaniknya.
- e. Pertahanan Diri: Di beberapa yurisdiksi, individu diizinkan memiliki senjata api untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman.
- f. Pelatihan dan Pendidikan: Senjata api juga digunakan dalam pelatihan militer dan kepolisian, serta pendidikan tentang keselamatan senjata api untuk memastikan penggunaan yang aman dan bertanggung jawab.

5. Jenis

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:³⁴

- a) Revolver model 66 kal. 357 Asal negara USA, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25

³⁴ Raslin. H, Evaluasi Standardisasi Sistem Pengadaan Distribusi dan Peruntukan Senjata Api Laras Pendek Jenis Pistol di Lingkungan Polri. Jurnal Litbang Polri, Vol 24 No. 3, (2021): 147-149.

- m, isi magasen 6 peluru.
- b) Revolver model 28 kal. 357 Asal negara USA, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 mm, isi magasen 6 peluru (silinder).
 - c) Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru. d. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.
 - d) Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk olahraga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi. Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

- a. Non otomatis;
- b. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya;
- c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya;
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang;
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm;
- f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata

api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.

6. Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri

Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah isu krusial yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri kerap dihadapkan pada situasi yang memerlukan penggunaan senjata api sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan mencegah tindakan kriminal yang membahayakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota Polri untuk memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur dalam menggunakan senjata api agar tindakan mereka tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menjadi acuan utama dalam menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata api oleh anggota Polri.³⁵ Peraturan ini mengatur tentang syarat-syarat, prosedur, dan batasan yang harus dipatuhi oleh anggota Polri saat menggunakan kekuatan, termasuk senjata api, untuk menjamin bahwa tindakan tersebut dilakukan secara proporsional, legal, dan akuntabel. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi SOP ini adalah pemahaman yang belum merata di kalangan anggota Polri mengenai peraturan dan batasan penggunaan senjata api. Banyak anggota Polri yang masih kesulitan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk bertindak cepat dalam situasi darurat dengan kewajiban untuk mematuhi SOP yang ketat. Hal ini seringkali menimbulkan insiden yang berujung pada penyalahgunaan kekuatan, yang

³⁵ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api.

dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi diatur juga dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).³⁶

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:

- a) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- b) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009):

1. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau

³⁶ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

masyarakat;

2. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009):

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri 1/2009).

Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009).

C. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Senjata Api

1. Sejarah

Dalam sejarahnya, penggunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian di Indonesia telah diatur oleh berbagai peraturan sebelumnya. Namun, sering kali regulasi-regulasi tersebut dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Misalnya, munculnya ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan eskalasi kekerasan dalam konflik sosial memerlukan panduan yang lebih tegas dan spesifik. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 berupaya menjawab kebutuhan ini dengan memperjelas situasi-situasi di mana penggunaan senjata api dapat dibenarkan dan prosedur yang harus diikuti.³⁷

Sebelum terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022, regulasi terkait penggunaan senjata api telah diatur dalam beberapa peraturan, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian.³⁸ Peraturan tersebut memberikan landasan hukum awal, tetapi seiring waktu, perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan tuntutan global terhadap hak asasi manusia mendorong perlunya pembaruan. Oleh karena itu, Polri mengeluarkan peraturan baru ini untuk memberikan pedoman yang lebih relevan dan akurat dalam penggunaan senjata api, dengan tetap memperhatikan asas proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas.

Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 menjelaskan di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Administrasi pada lembaga kepolisian dalam hal

³⁷ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api.

³⁸ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian.

perizinan senjata api itu sendiri adalah bagian dari administrasi negara dan sistem kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan bergantung dari bagaimana sistem pemerintahan suatu negara itu sendiri berjalan. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak lepas dari yang namanya manajemen dan administrasi.³⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga. Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, istilah Kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga Polisi, apabila dicermati dari pengertian fungsi Polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Peraturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan keselamatan publik. Selama beberapa tahun terakhir sebelum 2022, terdapat beberapa insiden yang melibatkan penggunaan senjata api oleh anggota Polri yang memicu kritik publik dan kebutuhan reformasi. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia.

³⁹ Awaloedin, Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian*, Jakarta:YPKIK, (2011), 15.

⁴⁰ Doris Manggalang Raja Sagala, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, Jurnal Univ. Atma Jaya Yogyakarta, (2014), 8.

Ditemukan bahwa peraturan yang ada sebelumnya kurang memadai dalam mengatur penggunaan senjata api secara tepat dan proporsional oleh anggota Polri, sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas. Sebelum peraturan ini dibentuk, dilakukan berbagai evaluasi dan kajian terhadap peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur penggunaan senjata api oleh kepolisian, termasuk Peraturan Kapolri yang lama. Evaluasi ini mencakup peninjauan insiden-insiden yang melibatkan penggunaan senjata api oleh anggota Polri, baik yang sesuai prosedur maupun yang dianggap penyalahgunaan.

Selain itu, kajian juga dilakukan terhadap praktik terbaik (best practices) internasional dalam penggunaan senjata api oleh penegak hukum, serta standar internasional seperti yang ditetapkan oleh PBB dan organisasi hak asasi manusia lainnya. Sebelum 2022, regulasi tentang penggunaan senjata api oleh Polri meliputi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010. Evaluasi terhadap regulasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pembaruan agar lebih sesuai dengan perkembangan situasi dan standar internasional.

Penyusunan dan Pembentukan:

1. Evaluasi dan Kajian:

Sebelum peraturan ini dibentuk, dilakukan berbagai evaluasi dan kajian terhadap peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur penggunaan senjata api oleh kepolisian, termasuk Peraturan Kapolri yang lama. Evaluasi ini mencakup peninjauan insiden-insiden yang melibatkan penggunaan senjata api oleh anggota Polri, baik yang sesuai prosedur maupun yang dianggap penyalahgunaan. Selain itu, kajian juga dilakukan terhadap praktik terbaik (best practices) internasional dalam penggunaan senjata api oleh penegak hukum, serta standar internasional seperti yang ditetapkan oleh PBB dan organisasi hak asasi manusia lainnya.

2. Proses Konsultasi:

Proses pembentukan peraturan ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait, lembaga penegak hukum lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan ahli hukum. Konsultasi publik juga dilakukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat tentang harapan dan kekhawatiran mereka terkait penggunaan senjata api oleh kepolisian.

3. Rancangan Peraturan:

Setelah melalui tahap evaluasi dan konsultasi, dirancanglah naskah awal peraturan yang kemudian dibahas secara internal di lingkungan Polri. Pembahasan ini melibatkan berbagai direktorat terkait dalam Polri, termasuk Divisi Hukum, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), dan Divisi Sumber Daya Manusia.

4. Uji Publik dan Revisi:

Sebelum ditetapkan, rancangan peraturan ini diuji publik melalui berbagai forum diskusi dan seminar. Masukan dari uji publik digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan naskah peraturan.

5. Penetapan:

Setelah melalui proses yang panjang dan mendetail, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 akhirnya ditetapkan oleh Kapolri dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Setelah diundangkan, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku dan menggantikan peraturan sebelumnya yang tidak sesuai. Implementasi peraturan ini melibatkan pelatihan intensif bagi anggota Polri dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 ini, diharapkan anggota Polri dapat lebih profesional dalam penggunaan senjata api, dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas anggota Polri dalam penggunaan senjata api, serta dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, dan untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota Polri dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta menghormati hak asasi manusia, keselamatan publik, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang menjadi landasan utama bagi penyusunan dan implementasi peraturan tersebut. Berikut adalah dasar hukum yang mendukung Perkap ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal Terkait: Pasal 30 ayat (4): Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁴¹

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal Terkait:

- a. Pasal 14 ayat (1): Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 15 ayat (1): Polri berwenang dalam penegakan hukum termasuk penggunaan kekuatan dalam situasi tertentu yang diatur

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal Terkait:

Pasal 18 ayat (1): Polisi wajib bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁴³

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal Terkait:

- a. Pasal 1 ayat (3): Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- b. Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁴⁴

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan ini mengatur bagaimana anggota Polri harus melaksanakan tugasnya dengan menghormati hak asasi manusia. Implementasi prinsip-prinsip HAM ini menjadi dasar penting dalam

⁴²Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

penyusunan peraturan penggunaan senjata api.⁴⁵

Dalam Kajian Hukum Pidana Islam, terdapat dasar-dasar aturan penggunaan senjata api. Peraturannya dalam Al-Qur'an dikaitkan dalam prinsip-prinsip yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan, keadilan, dan perlindungan jiwa. Hal-hal tersebut menjadi landasan etis dan moral yang mendukung peraturan tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dari Al-Qur'an yang relevan dengan peraturan tentang penggunaan senjata api:

1. Prinsip Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Ayat Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5:32):

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”⁴⁶

Ayat ini menekankan pentingnya perlindungan jiwa manusia. Dalam konteks penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum, senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa dari ancaman nyata, dan tidak boleh disalahgunakan untuk membahayakan nyawa tanpa alasan yang sah.

2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

⁴⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

⁴⁶ Qur'an Kementerian Agama dan Terjemahannya, Q.S Al-Ma'idah/5:32.

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ”⁴⁷

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam penegakan hukum. Penggunaan senjata api harus dilakukan secara adil, hanya ketika diperlukan, dan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi.

3. Prinsip Amanah (Kepercayaan)

Ayat Al-Qur'an Surah Al-Anfal (8:27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. ”⁴⁸

Dalam konteks ini, amanah (kepercayaan) yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan senjata api harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Senjata api adalah amanah yang harus digunakan sesuai dengan hukum dan dengan pertimbangan yang matang.

Meskipun Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Senjata Api adalah produk hukum positif, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat dilihat sejalan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Penggunaan senjata api yang diatur dalam peraturan ini berupaya untuk menjaga keamanan, melindungi jiwa, menegakkan keadilan, dan

⁴⁷ Qur'an Kementerian Agama dan Terjemahannya, Q.S An-Nisa'/4:58.

⁴⁸ Qur'an Kementerian Agama dan Terjemahannya, Q.S Al-Anfal/8:27.

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang semuanya merupakan prinsip-prinsip penting dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan peraturan ini, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dapat menjadi dasar moral dan etis bagi penerapan peraturan tersebut.

3. Tafsir Pasal

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri merupakan regulasi yang memberikan panduan rinci tentang penggunaan senjata api oleh anggota Polri untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah tafsir terhadap pasal-pasal penting dalam peraturan ini.⁴⁹

Pasal 1- Definisi dan Ketentuan Umum

Pasal ini memberikan definisi penting mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini, seperti "Senjata Api," "Penggunaan Senjata Api," dan "Pengguna Senjata Api." Pemahaman definisi ini penting sebagai landasan bagi pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dalam peraturan tersebut.

Pasal ini penting karena memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan senjata api dalam konteks operasional Polri. Definisi ini penting untuk menghindari adanya multi tafsir dalam implementasi peraturan, mengingat senjata api dapat mencakup berbagai jenis alat, seperti senjata api genggam, laras panjang, atau senjata api yang digunakan dalam situasi darurat.

Pasal 5 - Kriteria Penggunaan Senjata Api

Pasal ini mengatur tentang kriteria penggunaan senjata api oleh anggota

⁴⁹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api.

Polri. Senjata api hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu yang sudah diatur oleh peraturan ini, seperti untuk mempertahankan diri, melaksanakan tugas penegakan hukum, atau dalam keadaan darurat.

Pasal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan proporsionalitas yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepolisian. Dalam pandangan hukum Islam, hal ini juga selaras dengan prinsip "dharurah" (keadaan darurat) yang membolehkan penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, dalam batas-batas tertentu.

Pasal 8 - Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri

Pasal ini lebih lanjut menjelaskan prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri, termasuk syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti kewajiban memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menembak.

Pasal ini memperlihatkan bahwa penggunaan senjata api harus dilakukan secara terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tafsiran terhadap pasal ini dapat mengacu pada prinsip "al-'adl" (keadilan) dalam hukum Islam, yang menuntut bahwa setiap tindakan harus proporsional dan tidak berlebihan.

Pasal 9 - Pengecualian dalam Penggunaan Senjata Api

Pasal ini mengatur pengecualian dalam penggunaan senjata api, seperti dalam situasi yang sangat mendesak di mana tidak ada pilihan lain selain menggunakan senjata api untuk melindungi diri atau orang lain.

Pengecualian ini mencerminkan penerapan prinsip "darurat" dalam hukum Islam, yang membolehkan penggunaan kekuatan ekstrem dalam kondisi tertentu untuk melindungi nyawa atau harta benda. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang, seperti membunuh, dapat dibenarkan dalam keadaan darurat yang memaksa.

Pasal 12 - Penarikan Senjata Api

Pasal ini mengatur prosedur penarikan senjata api oleh anggota Polri. Senjata api tidak dapat digunakan sembarangan dan harus diserahkan kembali setelah selesai digunakan.

Pasal ini penting untuk menjaga agar senjata api tidak disalahgunakan. Dalam konteks hukum Islam, hal ini mengingatkan pada pentingnya menjaga amanah dan tidak menggunakan kekuatan secara sewenang-wenang, sesuai dengan prinsip "amanah" yang ada dalam Islam.

Pasal 13 - Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Senjata Api

Pasal ini mengatur tentang kewajiban adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal ini menggambarkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan senjata api, sejalan dengan prinsip "hisbah" dalam hukum Islam. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok diawasi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahi norma-norma yang berlaku.

Pasal 14 - Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Senjata Api

Pasal ini memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melanggar prosedur penggunaan senjata api, baik berupa tindakan disipliner maupun pidana, pasal ini juga mengatur tentang pentingnya tanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil oleh anggota Polri. Dalam pandangan Islam, ada prinsip "al-jaza'" (balasan) yang menekankan bahwa setiap tindakan yang salah harus mendapatkan balasan yang sesuai, sebagai bentuk keadilan dan pertanggungjawaban.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri adalah regulasi yang

komprehensif yang bertujuan untuk memastikan penggunaan senjata api oleh anggota Polri dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, sesuai hukum, dan menghormati hak asasi manusia. Tafsir terhadap pasal-pasal dalam peraturan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan implementasi dari masing-masing ketentuan. Hasil Penafsiran atas Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Senjata Api tersebut sejalan dengan hukum pidana islam karena hal tersebut ditegaskan bahwa pengguna senjata api dalam islam seperti dijelaskan seperti sub bab sebelumnya.